

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Terdapat 4 jalur pelayanan pada penelitian ini, penetapan jalur rencana tersebut didasarkan pada kecamatan dengan nilai *demand* tertinggi ke kecamatan dengan nilai *demand* terendah. Nilai *demand* tertinggi terdapat pada Kecamatan Kertek dengan nilai *demand* = 67.816,56 dan nilai *demand* terendah pada Kecamatan Wonosobo sebesar 15.910,69. Untuk *supply* atau penawaran yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan kebutuhan jumlah armada tertinggi pada Jalur 2 dengan kebutuhan 8 armada, pada Jalur 1, Jalur 3 dan Jalur 4 memiliki kebutuhan jumlah armada yang sama yaitu 6 armada. Masing-masing *load factor* tertinggi pada jalur rencana pelayanan angkutan perkotaan di Kabupaten Wonosobo terdapat pada Jalur 4 dengan nilai 49% dan *load factor* terendah terdapat pada Jalur 2 dengan nilai 35%.
2. Biaya pokok per jalur yang telah dianalisis pada analisis sebelumnya menunjukkan Jalur 3 sebagai jalur dengan biaya pokok tertinggi senilai Rp 6.075,-/bus-km dan Jalur 2 sebagai jalur dengan biaya pokok terendah senilai Rp 5.837,-/bus-km.
3. Pada analisis tarif yang sudah dibahas sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pokok tertinggi terdapat pada Jalur 2 sebesar Rp 556,-/pnp-km dan tarif pokok terendah terdapat pada Jalur 4 sebesar Rp 397,-/pnp-km, sedangkan hasil perhitungan tarif tertinggi terdapat pada Jalur 2 sebesar Rp 4.035,-/pnp dan tarif terendah terdapat pada Jalur 4 senilai Rp 2.062,-/pnp. Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum sesuai dengan jenis pelayanannya yaitu Angkutan Perkotaan untuk melayani Kabupaten Wonosobo, maka penggunaan tarif dalam analisis finansial menggunakan Tarif sebesar Rp 2.700,-

4. Dari hasil analisis finansial sesuai perhitungan BOK menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2002, diperoleh nilai pendapatan dan pengeluaran yang sama pada semua jalur yang direncanakan, sehingga pengusaha angkutan umum tidak mengalami kerugian dalam rangka penyelenggaraan angkutan perkotaan di Kabupaten Wonosobo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan angkutan umum di Kabupaten Wonosobo layak untuk dilayani.
5. Pada analisis tingkat kepentingan dan kinerja sesuai dengan kuesioner yang telah di bagikan ke 100 responden, maka dapat disimpulkan bahwa ada atribut-atribut yang masuk kuadran pertama. Kuadran pertama yaitu kuadran yang menunjukkan sebagai prioritas utama dalam perbaikan sistem angkutan perkotaan di Kabupaten Wonosobo yang meliputi kondisi armada, kemudahan mendapat angkutan, waktu kedatangan armada, dan waktu/lama perjalanan. Sedangkan pada kuadran keempat yaitu kuadran yang artinya dianggap kurang penting bagi penumpang namun sangat memuaskan kinerjanya meliputi pelayanan petugas, informasi jadwal keberangkatan di halte, dan informasi trayek/jalur pada armada.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut ini.

1. Terdapat banyak cara untuk menaikkan nilai pendapatan dalam analisis finansial seperti yang sudah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya, diantaranya adalah dengan menekan BOK, menaikkan *Load Factor*, menaikkan tarif angkutan umum, subsidi, dan lain-lain. Semua cara untuk dapat meningkatkan nilai pendapatan tentunya harus disertai dengan analisis kondisi *eksisting* di lapangan agar analisis dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.
2. Perlu dilakukannya survei Asal-Tujuan secara menyeluruh di Kabupaten Wonosobo agar dapat merepresentasikan pola perjalanan masyarakat sehingga dapat diperoleh hasil jalur atau trayek yang lebih akurat.
3. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi atau analisis kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar tarif angkutan umum

di Kabupaten Wonosobo karena tarif yang diperoleh pada analisis tarif menunjukkan hasil yang masih cukup tinggi yaitu Rp. 2.700,-. Perlu adanya peran pemerintah untuk melakukan subsidi terhadap tarif agar lebih terjangkau oleh daya beli atau kemampuan masyarakat.

4. Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, peran serta pemerintah untuk mewujudkan sarana transportasi publik seperti angkutan umum dalam kota sangat dibutuhkan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah diharapkan permasalahan transportasi pada setiap daerah berkembang seperti kemacetan di masa yang akan datang dapat teratasi.

Tidak hanya dukungan dari pemerintah dalam segi finansial, namun kebijakan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan kendaraan pribadi juga penting agar masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.

